

**“PENGARUH SITUASI PASCA KONFLIK SOSIAL TERHADAP PEMBELAJARAN
PKn di SEKOLAH”**

(Studi Kasus Pada SMA Negeri 26 Seram Bagian Barat Maluku)

LarosTuhuteru

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura

E-mail: larostuhuteru@gmail.com

Abstrack

After the social conflict, Maluku people live in certain areas on separated groups. Daily life interactions among groups have already established normally. However, to mingle with other different groups, one still feels less comfortable. Certain groups, who generally work as traders, are waiting for the situation to be conducive. Data and information regarding social conflict are analyzed in a set of qualitative research methods which, according to the researcher, are very effective in obtaining the objectives of this study. The study uses direct observation techniques and in-depth interview method towards certain participants as the key information that is determined deliberately according to the needs of this study. Through these methods, the results of this study can be presented. On that basis, this study aims to make a complete and comprehensive analysis, including the post-social conflict situation which can affect Civics learning in schools and the role of the community, parents or family and various competent parties in providing guidance to students after the Maluku social conflict. Civics is expected to shape student attitudes in an innovative way in terms of the format, so that teachers feel free to choose Civics learning methods to foster and shape the character of student character attitudes that are democratic and respectful of others and aware of the life of the nation and state.

Keywords: Social Conflict, Citizenship Education.

ABSTRAK

Maluku pasca konflik sosial Masyarakat kini tinggal terkotak-kotak, pada wilaya wilaya tertentu berdasarkan kelompok dan golongan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antar kelompok sudah berjalan “normal”. Tapi, untuk tinggal berbaur dengan kelompok yang berbeda, masih dirasakan kurang “nyaman”. Kelompok tertentu, yang umumnya bekerja sebagai pedagang, menunggu situasi kondusif. Semua data dan informasi mengenai konflik sosial dikemas melalui sebuah perangkat metode penelitian kualitatif yang menurut peneliti sangat efektif dalam rangka merealisasikan tujuan penelitian ini. Melalui teknik observasi langsung, Disamping itu penulis juga menggunakan metode wawancara mendalam, terutama terhadap beberapa orang informasi kunci yang ditentukan secara sengaja sesuai kebutuhan penelitian ini. Melalui perangkat metode-metode itulah, hasil penelitian ini dapat disajikan melalui penelitian ini. Atas dasar itulah penulis bermaksud membuat analisis secara lengkap dan komprehensif, diantaranya situasi pasca konflik sosial dapat berpengaruh pada pembelajaran PKn di sekolah dan peran masyarakat orang tua atau keluarga dan berbagai pihak yang berkompeten dalam memberikan pembinaan kepada siswa pasca konflik sosial Maluku. PKn dalam membentuk sikap siswa secara inovatif dalam tujuan dengan formatnya, sehingga para guru merasa keleluasan untuk menentukan pilihan metode pembelajaran PKn benar-benar membina dan membentuk watak sikap karakter siswa yang demokratis dan bersikap menghargai orang lain dan sadar akan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya setiap saat dan dalam berbagai situasi. Apabila lebih dari satu individu memiliki kesamaan tujuan, maka terjadilah kerja sama, sebaliknya apabila lebih dari satu individu mempunyai kepentingan yang berbeda, maka muncullah masalah-masalah sosial seperti konflik yang terjadi di Ambon (Maluku), Ternate (Maluku Utara), Poso (Sulawesi Tengah), Kupang (Nusa Tenggara Timur)

Konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik adalah alami dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dikatakan Walter (199:1) *”the history of humankind and the rise and fall of civilizations is unquestionably a story of conflict. Conflict is inherent in human activities. It is omnipresent and foreordained.”*

Berdasarkan konsep Parsons (1951), setiap sistem sosial diperlukan persyaratan fungsional. Diantara persyaratan-persyaratan itu di jelaskan bahwa setiap sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada setiap kondisi tindakan warga (adaptation) berikutnya, tindakan warga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (goal attainment). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan sistem sosial berfungsi (integration)

tanpaknya apa yang dikemukakan Parson itu cukup relevan untuk dipakai sebagai salah satu dasar dalam menganalisis secara structural dan fungsional konflik lokal: dan atas dasar konsep Parsons ini pengetahuan mengenai konflik sosial akan lebih memadai. Sehubungan dengan itu Coser mengatakan bahwa konflik adalah suatu komponen penting dalam setiap interaksi sosial oleh karena itu menurut Coser (1974) bahwa konflik tidak perlu dihindari, sebab konflik tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Dengan kata lain konflik dapat menyumbang banyak bagi kelestarian hidup sosial, bahkan mempererat hubungan antar anggota.

Para siswa SMA sebagai generasi muda, diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai mana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter generasi muda serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

Hal tersebut tidak terlepas dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang mempunyai tanggung jawab untuk membentuk warga negara yang baik. Namun, demikian masih ditemukan berbagai kendala. Kendala dan

keterbatasan tersebut menurut Winataputra dan Budimansyah (118-119: 2007) adalah (1). Masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru atau dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain; *Pertama*, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (*afektif dan psikomotorik*) dan memperoleh dampak pengiring (*nurturant affects*) sebagai "hidden kurikulum" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. *Kedua*, pengolahan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa atau mahasiswa melalui melibatkan secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstrakurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa atau mahasiswa. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstar- kurikuler sebagai wahana "hands-on experience" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan

untuk menyeimbangkan anantara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam kehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

PKn sebagai sebuah sistem pendidikan atau lembaga yang semestinya menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung proses belajar dan mendidik warga negara muda (siswa), proses belajar kondusif dan demokratis. Lingkungan yang damai dan menyenangkan adalah sangat kondusif untuk memfalisasi agar terjadinya proses belajar yang lebih baik. Sebaliknya konflik dan kekerasan dalam kehidupan di sekolah maupun masyarakat memberikan dampak negatif terhadap proses belajar siswa.

PKn sangat diperlukan dan memiliki nilai serta kedudukan yang sangat strategis bagi 'national character building' dalam arti seluas-luasnya terutama dalam membentuk warga negara yang baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaanya, PKn sangat rentan terhadap *bias politik praktis penguasa* (the ruling class) sehingga ia cenderung lebih merupakan instrumen penguasa dari pada sebagai wahana pembangunan watak anak bangsa berdasarkan konstitusi seperti yang dibuktikan oleh sejumlah hasil penelitian para ahli Civic Education (Apple, 1979, 1982; Bourdieu and Passeron, 1977; Snyders, 1976; Whitty, 1985) yang mengemukakan:

It (citizenship education) has also often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education " (Cogan, 1998: 5)

PKn membentuk karakter warga negara mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, akan lebih dari itu PKn sebagai pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik faham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan mau melakukannya (domain psikomotor). Seperti kata Aristoteles, karakter itu erat kaitannya dengan "habit" atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan.

PKn diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang membentuknya berdasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya sesuai motto Bhineka Tunggal Ika.

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, trampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PKn semestinya mendidik siswa atau generasi muda untuk berkarakter baik dan

mampu memecahkan masalah secara demokrasi, termasuk memecahkan masalah konflik mereka sendiri. Dengan demikian, pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam menyediakan pengajaran resolusi konflik.

PKn diharapkan mampu membelajarkan siswa untuk memecahkan masalah-masalah sosial bukan konvensional yang hanya menuntut siswa untuk menghafal fakta-fakta, yang hanya menggunakan metode ceramah yang membosankan siswa, ataupun pendidikan yang hanya sekedar mewariskan nilai-nilai lama tanpa dikaji secara kritis, dan juga bukan pendidikan yang hanya menekankan penguasaan disiplin ilmu dan pengembangan intelektualisme. Dengan meminjam tipologi tradisi social studies dari Barr, Barth, dan Shermis (1978), Pendidikan Kewarganegaraan mampu membelajarkan siswa untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial, termasuk konflik-konflik sosial yang bertumbuh pada tradisi *social studies* sebagai *reflective inquiry* (yang dikembangkan oleh Hunt and Metcalf, 1955).

PKn sebagai wahana pencerdasan bangsa sebagaimana menjadi tujuan nasional didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dibiarkan terus menjadi alat kekuasaan saja, akan tetapi menjadi pilar nasib bangsa dan generasi muda penerus bangsa. Apabila kita simak bersama, bahwa dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya mentransferkan ilmu semata, namun lebih jauh tentang pengertian dan pengetahuan itu yang lebih utama sehinggadapat mengubah atau membentuk karakter dan

watak generasi muda seseorang agar lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

PKn adalah suatu hal yang benar-benar ditanamkan selain menanamkan fisik, mental, dan moral bagi generasi muda agar mereka menjadi manusia yang beriman dan taqwa serta menghargai nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat seperti yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan .

Hasil analisis terhadap perkembangan PKn di Indonesia (Winataputra, 2001) menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang begitu mendasar pada tahapan paradigma sehingga telah mengakibatkan ketidakpastian, baik dalam tataran konseptual maupun tataran praktisi. Kelemahan-kelemahan tersebut, setidaknya, terdiri atas empat kelemahan pokok, yakni: (1) Kelemahan dalam konseptualisasi PKn (2) Penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral behavioristik, terperangkap pada proses penanaman nilai yang cenderung indoktrinatif (*values inculcation*): (3) ketidakkonsisten terhadap penjabaran berbagai dimensi tujuan PKn ke dalam kurikulum; dan (4) Keterisolasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya.

Sejalan dengan penilaian tersebut Wahab (1999) mengemukakan beberapa kelemahan yang ada pada PKn yang di masa yang lalu, (1) Terlalu menekankan pada aspek nilai moral yang menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk

menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) Kurang diarahkan pada pemahan struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) Pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif; dan (4) Berorientasi pada kepentingan penguasa.

PKn lebih khusus bertujuan pada pembinaan warganegara yang baik termasuk generasi muda yang bertanggung jawab. PKn ini bersifat interdisipliner, tansdisipliner atau multidimensional yang materinya terutama berasal dari konsep-konsep dasar dari ilmu politik, ilmu hukum, idiologi negara, filsafat moral, dan juga dukungan dari konsep-konsep dasar ilmu-ilmu sosial lainnya.

PKn jika dilihat dari pandangan filsafat pendidikan yang mendasarinya dalam Maftuh Bunyamin (2005: 137) adalah pendidikan *esensialism* yaitu pendidikan di sekolah harus dalam bentuk pendidikan keilmuan dengan memberikan penekanan pada pengembangan intelektualism siswa.

Peran PKn dalam membangun karakter generasi muda begitu dirasakan penting karena memiliki nilai yang strategis dan dapat mempengaruhi nasib bangsa di masa depan. (Brangson, 1998; Rachman, 2001; Reid, 2005; maftuh, 2007).

Baranson (1998: 14) menyatakan hasil penelitian mata pelajaran di sekolah seperti pemerintahan, kewarganegaraan, sejarah dan sastra bila diajarkan secara baik akan memberikan kerangka konseptual yang diperlukan untuk pendidikan karakter. Hal ini berarti bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan bukan hanya melalui mata pelajaran PKn melainkan melalui mata lain juga. Materi Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Priyono (1959), pernah

menegaskan bahwa “*It is not enough for live of nation and country to be fostered by the study of civics*” (Feith dan Castles, 1970:329). Menurut Feith dan Castles, pendidikan karakter dapat diselenggarakan juga melalui mata pelajaran lain yang mengembangkan dimensi emosioal, seni, mengajarkan tentang kebebasan warisan nenek moyang, keindahan ibu pertiwi, budaya dan kesenian.

PKn perlu memiliki tiga fungsi pokok dalam pengembangan warganegara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*) hal ini berkaitan dengan tiga kompetensi warganegara yang baik yang dikemukakan oleh Branson (1998), yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*).

Dengan melihat pada tiga fungsi pokok atau tiga kompetensi utama yang perlu dikembangkan oleh pendidikan kewarganegaraan di atas maka salah satu misi dan peran pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai pendidikan aspek efektif , yakni pendidikan budi pekerti (karakter), nilai dan moral. Misi sebagai pendidikan aspek efektif ini terutama berkaitan dengan fungsi pengembangan *civic responsibility* atau *civic disposition* di atas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan afektif atau sebagai pendidikan nilai ini lebih mirip dengan pendidikan kewarganegaraan di Inggris dimana Pendidikan Kewarganegaraan merupakan

bagian dari pendidikan moral nilai (Edwards dan Fogelman, 2000: 95). Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah nilai-nilai pilihan yang dipertimbangkan sebagai “ nilai-nilai Indonesia yang baik”, dan nilai-nilai tersebut mencakup pula nilai-nilai demokrasi universal. Namun demikian pendekatan untuk mengajarkan nilai-nilai ini, semestinya tidak dilakukan melalui indoktrinasi nilai-nilai untuk mempertahankan status quo, tetapi lebih menggunakan pendekatan yang lebih demokratis.

Peran PKn dalam membangun karakter generasi muda pasca konflik begitu dirasakan penting karena memiliki nilai yang strategis dan dapat memperbaiki serta mempengaruhi nasib bangsa di masa depan. (Branson, 1998: Rahcman, 2001: Reid, Sapriya, 2007).

METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus . Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, resepsi dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Dalam paradigma ini relaitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna (Nana Syaodih, 2005 : 60).

Dalam penelitian ini, sumber data di pilih secara *purposife* dan bersifat *snowball sampling*. Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilah oleh orang yang memiliki *power* dan otoritas pada situs atau objek yang di teliti, sehingga mampu

”membuka pintu” kemana saja peneliti akan mengumpulkan data. Dengan demikian setelah peneliti melakukan penelitian hingga mendapat data jenuh. Oleh karena itu, maka sumber data atau subjek penelitian sebagai berikut :

Untuk mendapat informasi tentang pembentukan karakter Generasi Muda melalui PKn maka peneliti mewawancarai :

1. Guru PKn yang di pandang menguasai problem-problem PKn. Sampai pada data jenu artinya data yang sudah berulang.
2. Siswa.
3. Orang Tua
4. Tokoh Pemuda
5. Tokoh Masyarakat

Karena bersifat snowball sampling, maka informan yang sengaja ditetapkan oleh peneliti, dapat berkembang dilapangan apabila peneliti menemukan orang yang lebih mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif

Observasi ialah cara untuk mendeskripsikan apa yang sedang terjadi, siapa dan apa yang terlibat, kapan dan dimana sesuatu itu terjadi, dan mengapa sesuatu itu terjadi- paling tidak dari sudut pandang partisipan ketika mereka melakukan sesuatu dalam situasi tertentu. Hal yang sama dikemukakan oleh Patton, dalam Safriya, H. (2007: 139) yang menanamkan ”*Naturalistic obsevation*” yang dilakukan di lapangan (*field*) sebagai sejumlah cara atau jenis metode untuk mengumpulkan data melalui observasi,

yakni ”*participant obsevation, field obsevation, qualitative observation, or field research*”, walaupun setiap istilah ini tergantung pada kondisi dan tujuan analisis kualitatif. Istilah-istilah observasi yang dikemukakan Patton tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama, yakni obsevasi untuk kepentingan pengumpulan data kualitatif.

2. Wawancara

Wawancara, ialah cara untuk mengali informasi, pemikiran, gagasan, sikap dan pengalaman para pakar dan praktisi. Wawancara tatap muka dilakukan langsung antara peneliti dan nara sumber secara dialogis, tanya jawab, diskusi dan melalui cara lain yang dapat memungkinkan diperolehnya informasi yang diperlukan. Teknik wawancara ini merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang utama untuk mendeskripsikan pengetahuan dan pengalaman informan.

3. Studi Dokumenter

Studi Dokumenter , ialah cara untuk menggali, mengkaji, dan mempelajari sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk laporan penelitian, makalah, jurnal, klipng media masa, dan dokumen negara (pemerintah). Pemilihan metode ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam sumber-sumber tertulis tersebut dapat diperoleh ungkapan gagasan, persepsi, pemikiran, serta sikap para pakar dan praktisi pendidikan kewarganegaraan.

Untuk mendukung ketersediaan data dan analisis data, peneliti memanfaatkan sumber-sumber lain berupa dokumen negara, catatan dan dokumen (*non human resource*). Menurut Lincoln dan

Guba (1985: 276-277) catatan dan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari kajian –kajian tertentu atau sebagai bentuk pertanggungng jawaban. Dalam studi dokumentasi ini, peneliti akan memanfaatkan sumber kepustakaan berupa hasil penelitian, dan pembahasan konseptual dengan menggunakan teknik analisis yang dikaitkan dengan upaya pengembang karakter generasi muda yang lebih baik pasca konflik.

Arikunto, (1998:236) mengemukakan bahwa ”studi dokumenter merupakan teknik yang digunakan untuk mengkaji dan mencari data mengenai hal-hal atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, noutulen rapat, agenda dan sebagainya”. Lingcoln dan Guba, (1985:276-277) mengatakan bahwa dokumentasi dan catatan digunakan sebagai pengumpulan data didasarkan pada beberapa hal yakni:

1. Dokumen dan catatan ini selalu dapat digunakan terutama karena mudah diperoleh dan relatif lebih murah.
2. Merupakan info yang mantap baik dalam pengertian merefleksikan situasi secara akurat maupun dapat dianalisis ulang tanpa melalui perubahan di dalamnya.
3. Dokumen dan catatan merupakan sumber informasi yang kaya.
4. Kedunya merupakan sumber resmi yang tidak dapat disangkal, yang menggambarkan kenyataan formal.
5. Tidak seperti pada sumber manusia, baik dokumen maupun catatan nonkreatif, tidak memberikan reaksi dan respon atau perlakuan peneliti.

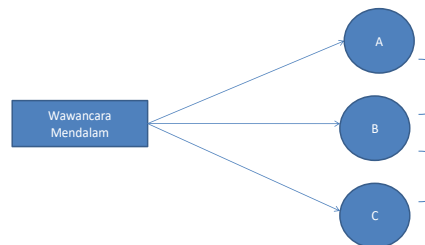
4. Triangulasi Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data berbagai sumber data sebagai berikut

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama peneliti menggunakan obsevasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

Sugiyono, (2007:85) mengatakan bahwa ”nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka dapat diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti”. Lebih lanjut Sugiyono menggambarkan proses triangulasi:



Gambar .01
Proses Triangulasi Data

*Sumber data modifikasi dari buku
Sugiyono, (2007:85)*

Proses triangulasi data seperti yang telah digambarkan pada bagam di atas, merupakan salah satu bentuk pengecekan terhadap sumber-sumber hasil wawancara, yang dilakukan oleh peneliti, agar tetap menjunjung tinggi tingkat kebenaran data yang diperoleh peneliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki data, selama ini lapangan dan setelah di lapangan dalam hal ini Nasution (2003) menyatakan "analisis telah dirumuskan dan mejelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, berlangsung terus sampai peneliti dan hasil peneliti. Dalam peneliti kualitatif, analisi data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles and Huberman yakni : " Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing / verivication*". Ada tiga langka analisis di antaranya.

Mereduksi data berarti merangkum, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan menggunakan kode pada aspek-aspek tertentu.

Lingcoln dan Guba (1985:345) mengatakan bahwa : Langkah pertama dalam pemerosotan satuan ialah peneliti hendaknya membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang sudah terkumpul. Setelah itu, usahakan agar satuan-satuan dan pemasukan ke dalam kartu indeks. Penyusunan satuan dan pemasukan ke dalam kartu indeks hendaknya dapat dipahami oleh orang lain. Pada tahap ini analisis hendaknya jangan dulu membuang satuan yang ada walaupun mungkin dianggap tidak relevan.

Tujuan analisis data yang dilakukan oleh peneliti yakni proses mencari dan menyusun cera sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat muda dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Creswell, (1998:147-150) langkah-langkah yang sering dipakai dalam penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mulai dengan satuan deskripsi penuh mengenai pengalaman pribadinya tentang penomena tersebut.
2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan-pernyataan, tentang

bagaimana orang memahami topik yang diteliti, membuat daftar pertanyaan yang signifikan dan memperlakukan semua data secara sama.

3. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dikelompokkan ke dalam unut-unit makna”, peneliti membuat daftar unit-unit ini dan kemudian menulis sebuah deskripsi.
4. Peneliti kemudian melakukan refleksi pada deskripsi pribadinya dan menggunakan variasi imajinatif atau deskripsi struktural, mencari semua makna.
5. Peneliti kemudian menyusun suatu deskripsi menyeluruh dari makna dan esensi dari pengalaman tersebut.

Bertolak dari dasar konsep di atas, makna untuk memudahkan peneliti dalam proses menganalisis data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan alur analisis yang adalah sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan

Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menemukan fokus penelitian. Dalam kaitan dengan itu maka, peneliti telah melakukan analisis terhadap beberapa tesis dan hasil-hasil penelitian terdahulu di Maluku mengenai konflik *horizontal*. Analisis ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran tentang masalah yang akan dikaji oleh peneliti.

Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan

selama di lapangan. Sogiyono, (2007:90) mengibaratkan tahapan ini seperti:

Seseorang yang sedang mencari pohon jati di suatu hutan. Berdasarkan karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. Oleh karena itu peneliti dalam membuat proposal peneliti, fokusnya adalah ingin menemukan pohon jati pada hutan tersebut, berikut karakteristiknya. Setelah peneliti masuk ke hutan beberapa lama, ternyata hutan tersebut tidak ada pohon jatinya. kalau focus peneliti yang dirumuskan dalam proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan merubah focusnya, tidak lagi mencari kayu jati di hutan, tetapi akan merubah dan mungkin setelah masuk hutan lagi tidak tertarik pada kayu jati, tetapi beralih kepada pohon-pohon yang lain, bahkan juga mengamati binatang yang ada di hutan tersebut.

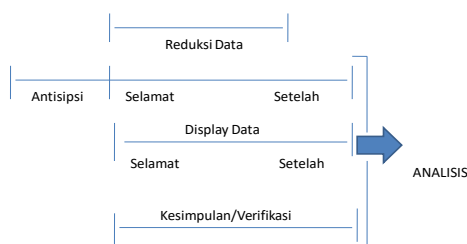
2. Analisis Selama di Lapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles adn Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya

sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing / verification*.

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar: 02 Periode Pengumpulan Data

Sumber data : Miles dan Huberman, (1992:18).

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan stranspormasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat diartikan dan diverifikasi.

Bagian kedua dari analisis adalah penyajian data, penyajian yang dimaksudkan adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif dalam bentuk teks

naratif. Dalam hal ini Miles dan huberman (1992) menyatakan “*the mos frequent from of display data for qualitative research dat in the past been narrative tex*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal, didukung oleh bukti-bukti. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencairan ulang yang digunakan, serta kecakapan peneliti.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Bertepatan dengan peringatan ulang tahun Republik Maluku Selatan (RMS), 25 April 2004, rangkaian konflik komunal kembali membakar kota Ambon. Pecahnya konflik baru ini mengakhiri suasana damai yang telah terbangun sejak penghujung 2002. Bahkan, sebenarnya, sejak akhir 2001 hampir tak ada lagi konflik besar antara kedua komunitas. Sejak akhir 2001 pola konflik di Maluku bersalin rupa: dari konflik dua komunitas menjadi rangkaian bentuk teror, semisal peledakan bom dan ranjau, penyerangan mendadak terhadap suatu komunitas, serta penembakan misterius oleh penembak gelap. Kondisi keamanan membaik secara berarti sejak

pertengahan 2002 setelah investigasi polisi berhasil menyingkap keterkaitan sekelompok anggota geng Coker pimpinan Bertj Loupatty dengan sejumlah aparat keamanan dari Kopassus (Tempo edisi 13 Januari 2003). Hasil investigasi itu berhasil menyingkap sejumlah teka-teki peristiwa terror yang terjadi sebelumnya.

Kondisi keamanan di Ambon terus membaik, terutama setelah dilangsungkannya pemilihan Gubernur Maluku pada 16 Agustus 2003, yang sebelumnya selalu dibayang-bayangi kecemasan akan rusuh sehingga beberapa kali ditunda. Puncaknya terjadi pada Maret-April lalu: pelaksanaan kampanye Pemilu 2004 berlangsung dengan relatif aman dan damai. Di Ambon peneliti menyaksikan massa berpawai dengan bergairah, namun tanpa rusuh dan tanpa darah tertumpah. Namun, peristiwa kerusuhan 25 April 2004 menunjukkan bahwa tragedi kekerasan sosial yang terjadi sejak 19 Januari 1999 hingga pertengahan 2002 masih meninggalkan luka-luka sosial yang mendalam di Ambon. Mengapa damai masih rapuh dan getas di Ambon? Ada sejumlah faktor yang bisa dijelaskan.

Pertama, konflik komunal yang terjadi sejak 19 Januari 1999 telah menghasilkan terjadinya segregasi komunitas di pulau Ambon: ada "daerah Islam", ada "daerah Kristen". Segregasi komunitas berdasarkan agama sebenarnya merupakan salah satu warisan era kolonial, sehingga kemudian terbentuk "Negeri Salam" dan "Negeri Sarani". Pemukiman campuran (Islam-Kristen) yang mulai tumbuh dan berkembang terutama sejak 1970-an kini hilang, dan setelah konflik

orang kembali kepada pemukiman berdasarkan agama masing-masing. Bahkan sejumlah asrama militer di Ambon masih ditempati oleh aparat dari agama tertentu secara terpisah.

Kedua, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Ambon. Hal ini diperburuk dengan banyaknya pengungsi yang belum kembali ke daerah asal.

Ketiga, masih banyaknya senjata (baik rakitan maupun standar militer) yang masih dimiliki secara ilegal oleh masyarakat. Diperkirakan masih ada sekitar 500 pucuk senjata dan ribuan peluru organik militer yang beredar secara ilegal di masyarakat dan ratusan lain senjata dan bom rakitan. Fakta ini membuat potensi kekerasan semakin besar di kota Ambon.

Keempat, masih adanya kelompok "garis keras" dalam dua komunitas tersebut. Dalam komunitas Kristen, kelompok ini sebagian besar berafiliasi kepada Forum Kedaulatan Maluku yang merupakan penerus gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Di komunitas Islam, kelompok ini sebagian besar tergabung dalam kelompok-kelompok laskar yang berafiliasi kepada Laskar Jihad dan kelompok sejenisnya. Identifikasi adanya kelompok "garis keras" ini terutama terjadi menjelang perundingan damai Malino II pada Februari 2002, ketika kelompok-kelompok tersebut menolak datang ke meja perdamaian.

Kelima, masih adanya kelompok "garis keras" di kalangan aparat keamanan. Yang dimaksud adalah (1) mereka yang percaya bahwa pendekatan militer merupakan modus terbaik dalam

penanganan konflik di Ambon, khususnya yang terkait dengan isu separatisme, (2) mereka yang berupaya untuk meneruskan eksistensi dan peran besar aparat keamanan dalam situasi pascakonflik, (3) mereka yang terlibat dan bersikap partisan selama konflik namun tidak mendapat hukuman. Munculnya fenomena penembak gelap dalam konflik mutakhir ditengarai merupakan bagian dari ulah kelompok ini. Lanskap sosial politik pascakonflik seperti inilah, antara lain, yang membuat kondisi damai di Ambon masih getas.

Setiap ikhtiar membangun perdamaian yang langgeng di Ambon maupun Maluku pada umumnya harus menyentuh faktor-faktor kerentanan sosial tersebut secara cermat, saksama, dan serius. Jika tidak, kita masih akan menghadapi peristiwa-peristiwa kekerasan serupa di masa-masa mendatang. Setelah melalui lobi dan tekanan berbagai pihak, akhirnya konflik dapat diakhiri. Pasca konflik, sosial Ambon berubah dalam berbagai aspek. Ambon yang semula bersih menjadi kumuh dan kotor. Hingga kini masih banyak terlihat puing-puing gedung dan rumah yang pernah terbakar. Gedung dan rumah yang pernah terbakar umumnya tidak segera diperbaiki karena para pemiliknya masih mempertimbangkan situasi keamanan, yang sewaktu-waktu muncul Sampah juga banyak berserakan hampir di setiap sudut kota. Got-got rusak, saluran PAM masih banyak yang belum diperbaiki, Gedung-gedung sekolah dari tingkat Taman kakan-kanak (TK), sampai Perguruan Tinggi, sebagian belum diperbaiki demikian pula rekrutmen para guru belum merata, sama halnya dengan jaringan komunikasi seperti kabel telpon

juga diperbaiki. Pengemis juga banyak bermunculan. Pos-pos keamanan (tentara dan Brimob) masih dijumpai di berbagai sudut kota. Beberapa kelompok masyarakat mengaku masih menyimpan perasaan ketakutan dan troma terhadap yang lain.

Masyarakat kini terkotak-kotak, berdasarkan kelompok dan golongan. Kelompok Obet atau Kristen, tinggal di wilayah-wilayah dataran tinggi atau daerah atas, sementara kelompok Acang atau Islam, di wilayah dataran rendah/dekat pantai. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antar kelompok sudah berjalan “normal”. Tapi, untuk tinggal berbaur dengan kelompok yang berbeda agama, masih dirasakan kurang “nyaman”. Etnis tertentu, terutama Cina yang umumnya bekerja sebagai pedagang dengan modal besar, memilih strategi menunggu situasi kondusif. Tanah dan rumah mereka tidak dijual, tapi dititipkan pada orang lain, aparat, atau tokoh masyarakat untuk menjaganya. Para penjaga ini diuntungkan dari dua sisi. Yaitu, dari pemilik rumah, mereka mendapat uang jaga. Jika ada pendatang yang mau menempati rumah (bekas terbakar) tersebut, mereka pun mendapat uang sewa tambahan.

Sebenarnya masyarakat sudah jenuh oleh kondisi sosial yang ada dan keamanan yang kondusif. Akibatnya, banyak yang apatis serta menjalani kehidupan hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri. Bisa dikatakan hampir seluruh tatanan sosial hancur, warga terkotak-kotak, dan saling curiga. Kadang terjadi perkelahian antar-warga. Khususnya kalangan muda di satu kelurahan, terutama di daerah pengungsian. Minum-minuman keras hingga mabuk suatu kebiasaan di masa

lalu masih banyak dilakukan hingga kini. Kondisi mabuk ini menjadi salah satu pemicu mudahnya muncul perkelahian-perkelahian tersebut.

Setelah konflik sosial reda, sejumlah program/proyek kemanusiaan, baik dari pemerintah maupun LSM, mencoba masuk dengan maksud segera memulihkan Ambon. Kota yang semula berduka akibat konflik ini tiba-tiba mendapat “berkah” bantuan. Namun, tidak sedikit program yang dikucurkan tanpa perencanaan matang. Sehingga masyarakat cenderung memandang kehadiran suatu lembaga identik dengan kehadiran bantuan atau uang. Awalnya, *Pilot Project* juga disikapi seperti ini. Ketika Tim *Pilot Project* pertama kali masuk ke daerah ini, masing-masing stakeholder baik itu tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan sudah mendapat informasi tentang *Pilot Project*. Tapi, informasi yang didapat hanya terbatas dari buku Pedoman Umum *Pilot Project*. Sasaran program dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah: mengenai penanggulangan kemiskinan (*Pronangkis*) di Kota Ambon Pasca Konflik.

Pasca konflik sosial beberapa pihak kuatir termasuk masyarakat, dan lembaga-lembaga sekolah, dengan situasi yang dapat berdampak kepada peningkatan angka kejahatan. Data kriminalitas di tingkat kota cenderung mengindikasikan peningkatan. Upaya membangun kebersamaan dan menumbuhkan kembali semangat membangun telah diupayakan pemda, termasuk pemerintah kelurahan, dengan mengembalikan salah satu budaya setempat yang dikenal dengan masohi, atau gotong royong untuk menggalang

kebersamaan. Kegiatan masohi dilakukan melalui satu kegiatan bersama. Dalam kegiatan ini semua masyarakat didorong ikut terlibat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Misalnya, dalam pembangunan Gereja kaum, Muslim turut menyumbang. Sebaliknya, apabila kaum Muslim membangun Masjid, kaum Nasrani turut menyumbang. Kebiasaan lainnya yang mulai ditumbuhkan kembali adalah makan bersama (makan pattita) sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan. Semua kegiatan ini biasanya diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

Usai konflik sosial yang berkecamuk di Ambon sejak tahun 1999 menimbulkan banyak masalah baru. Salah satunya adalah penambahan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 24 persen dari seluruh penduduk Ambon. Kondisi tersebut diperparah oleh kecilnya lowongan kerja serta para orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya karena akibat kondisi dan tingkat penghasilan, pendapat tidak mencukupi sebagai akibat hengkangnya sejumlah investor masuk ke Ambon. Akibat rumah mereka hancur saat konflik terjadi, mereka kemudian tinggal sampai saat ini di berbagai tempat pengungsian yang tersebar di berbagai daerah di Ambon. Dan anak-anak usia sekolah tidak sempat mengikuti pendidikan atau sekolah akibat kekhawatiran masyarakat sewaktu-waktu muncul kekacauan yang berakibat konflik yang lebih besar seperti konflik yang terjadi tahun 1999. Dengan demikian situasi seperti itu dapat mengganggu penyelenggaraan pendidikan terutama menyangkut pembinaan karakter generasi muda pasca

konflik khususnya siswa. Dengan demikian situasi Kota Ambon pasca konflik tersebut, dapat berpengaruh.

SIMPULAN

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang telah diuraikan di atas tampak bahwa Fokus terhadap pembelajaran PKn di sekolah yang dapat berpengaruh terhadap perilaku siswa atau generasi muda, pasca konflik sosial yang baik akan terbentuk maka baik pula karakter warga Negara, namun PKn bukan satu-satunya wahana untuk membangun sikap siswa sebab hakikat sikap tidak hanya terkait dengan kehidupan demokrasi dan hukum dalam konteks kehidupan bernegara melainkan termasuk karakter dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara melainkan sikap siswa termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga juga. Pembelajaran sebagai upaya semua pihak di Maluku guna mengembangkan potensi kepribadian manusia yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang konsisten dipengaruhi oleh aspek psikologi, kesehatan, mental, seta pribadi individu generasi muda, serta konteks kehidupan masyarakat pasca konflik sosial.

Dengan demikian jika dilihat dari kondisi di atas telah memperkuat kedudukan PKn sebagai wahana pendidikan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama siswa yang demokrasi. Akan tetapi pada kenyataannya pembelajaran PKn masih dihadapkan pada beberapa kondisi empirik yang sifat kontraproduktif dengan kedudukan pembelajaran PKn sebagai wahana peningkatan kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara,

diantaranya: 1) kompetensi guru termasuk keterbatasan sarana dan prasarana sekolah; dan 2) persoalan lingkungan terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi pasca konflik yang berpengaruh terhadap pembelajaran PKn di sekolah yang kurang harmonisasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut Pendidikan Kewarganegaraan harus ditempatkan tidak hanya sebagai program pendidikan dipersekolahan saja, tetapi harus menjadi suatu pendidikan PKn yang bisa membentuk karakter warga negara, serta sebagai suatu pendidikan yang mempengaruhi situasi pasca konflik sehingga siswa dan masyarakat bisa hidup rukun dan damai serta berdampingan satu sama lain di Maluku yang harus diterapkan oleh pemerintah beserta seluruh *stakeholders* PKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimin. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brangson, M.S. (1998). The role of Civic Education: a Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network. [Http://www.civiced.org](http://www.civiced.org).
- Coser A Lewis. (1956). *The Fungtions of Sosial Conflict*, New York, USA, The Free Press,
- Feith, Hebert, (1962). *The Decline Of ontitutional Democracy In Indonesia Ithaca. New York: Cornell University Press*.
- Guba, G, E dan Lingcoln, S. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: Sega Publications. Bavary.

- Hudson, Michael C, & Charles Lewis Taylor, (1972). *World Handbook of Political & Social indicators, New Haven and London, Yale University press.*
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UPI- Press : Jakarta.
- Nasution S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* : Cetakan Ketiga. Bandung : Tarsito.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Sugiono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, A. Azis. (1996). *Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik : Model Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Menuju Warganegara Global*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada IKIP Bandung.
- Walter Isaard (1992). *Understanding Conflict and the Science of Peace Cambridge, MA: Blackwell.*
- Winataputra Udin dan Budimansyah Dasim (2007). *Civic Education, Konteks dan Landasan Bahan Ajar dan Kultur kelas, Bandung Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia*
- Winataputra, Udin S. (1999). *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi di Indonesia*. Paper disampaikan pada Workshop on the Development of Concepts and Content of Civic Education for Indonesian Schools.16-19 Oktober 1999di Bandung
- Winataputra, Udin, S. (2001). *Reorientasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Erah Global*. (makalah) Disampaikan Dalam Seminar Nasional dan Kongres Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS.
- Maftuh Bunyamin (2005). *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Bandung : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sapriya H. (2007). *Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. Bandung Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Sumber Lain :

Mhtml:
<file:/F/Gerakan%20Indonesia%bersatu20'''.mht>
<http://koleksi-skripsi.blogspot.com/2008/07teori-pembentukan-karakter.Hmtl>
<http://id.wikipedia.org/wiki/konflik>